

	<p style="text-align: center;">Wahana Riset Akuntansi Vol. 7, No 1, April 2019, Hal 1425-1436</p>	<p>ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online) http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/issue/archive</p>
---	---	---

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017

Mutiara Sari¹, Fefri Indra Arza²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: mutiara.s1296@gmail.com

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: fefriarza@gmail.com

Abstract: *This study aims to obtain empirical evidence about the influence of the characteristics of local governments on local government financial distress in districts and cities throughout Indonesia for the period 2015-2017 whose data was obtained from the BPK and BPS. The dependent variable in this study is financial distress and its independent variables, namely the characteristics of local governments which consist of financial independence, the degree of decentralization, the complexity of local governments that are proxied by population, expansion of regions proxied by the administrative age of regional governments and area. The value of financial independence, population and regional expansion has a positive and significant effect on financial distress, while the value of the decentralization degree and area has a negative and significant effect on the financial distress of the regency and city governmen in Indonesia.*

Keywords: *Local Government Finance, Characteristics of Local Government; Financial Distress*

How to cite (APA 6th style)

Sari, M; Arza, F.I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1425-1436.

1. PENDAHULUAN

Tujuan utama organisasi sektor publik yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan *profit oriented* (UU No 32 Tahun 2004). Suatu capaian kinerja pemerintah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat, artinya kebijakan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang pro rakyat dengan mengoptimalkan alokasi belanja modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Mempermudah pencapaian tersebut, dilakukan dengan adanya reformasi setelah tahun 1998 di Indonesia yaitu perubahan bentuk tata kelola pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian yang hendak dilakukan oleh pemerintah melalui otonomi daerah menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, adanya temuan lembaga independen yang ikut mengawasi pelaksanaan otonomi daerah menyebutkan bahwa kondisi

keuangan daerah cenderung kritis dan mengkhawatirkan akibat penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah ditandai dengan banyaknya alokasi belanja rutin yang sifatnya kurang produktif dan berkurangnya alokasi untuk belanja modal (Syurmita, 2014).

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Dirjen dana perimbangan mengenai potret APBD tahun 2017 (Republika.co.id) komposisi belanja modal kabupaten dan kota di Indonesia masih di bawah persyaratan yang ditetapkan oleh Permendagri dan hasil penelitian seknas Forum Indonesia untuk Transparan (FITRA), (Seknasfitra.org.id) didapatkan bahwa tren belanja modal terhadap belanja daerah kabupaten/kota masih di bawah ketentuan ketentuan regulasi belanja modal. Belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemerintah pusat mensyaratkan belanja modal daerah yang optimal adalah 30% dari total belanja daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Jika fenomena-fenomena tersebut berlanjut maka akan mengakibatkan pemerintah daerah mengalami kondisi *financial distress* sehingga tidak akan mampu

memberikan pelayanan yang memadai untuk masyarakat yang berdampak terhadap tujuan Pemerintah yang tidak akan tercapai.

Financial distress dalam konteks sektor publik adalah suatu kegagalan dari pemerintah dalam penyediaan layanan ataupun fasilitas publik yang sesuai standar, dimana hal ini diakibatkan oleh ketidakcukupan dana yang dimiliki pemerintah dalam pembiayaan untuk diinvestasikan pada infrastruktur publik disebabkan oleh minimnya alokasi belanja modal karena lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Kleine *et al.* (2005) menjelaskan *financial distress* pada pemerintahan sebagai kegagalan pemerintah untuk mencapai standar pada kegiatan operasi, utang, dan kebutuhan masyarakat dalam beberapa tahun berturut-turut. Pengertian *financial distress* pada penelitian ini yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang memadai karena minimnya alokasi belanja modal.

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun (Sudarsana, 2013). Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010). Belanja modal memiliki peranan penting dalam pelayanan publik, semakin kecil persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal akan berdampak terhadap pembangunan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang memadai untuk masyarakat.

Kleine *et al.* (2005) menekankan hal yang menyebabkan kondisi *financial distress* yaitu ketidakmampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan penurunan ekonomi khususnya ketika beberapa tanggung jawab dialihkan dari pusat ke kabupaten atau kota. Jones dan Walker (2007) menyatakan penyebab kegagalan pemerintah dalam mencapai standar pemenuhan kebutuhan masyarakat disebabkan oleh banyak faktor yaitu faktor politik, sosial ataupun ekonomi

Beberapa peneliti terdahulu telah mengembangkan indikator atau faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* pemerintah daerah diantaranya yaitu Clark (1997) menggunakan empat indikator yang mempengaruhi kondisi *financial distress* pemerintah daerah yaitu beban keuangan pemerintah, indikator rasio

keuangan, karakteristik sosial ekonomi (seperti; jumlah penduduk, pendapatan perkapita), dan pengukuran arus pendanaan. Jones and Walker (2007) menggunakan karakteristik dewan (luas wilayah, populasi penduduk, ukuran dewan) dalam membuktikan faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* di Negara bagian Australia. Syurmita (2014) menggunakan karakteristik pemerintah daerah (kompleksitas pemerintah daerah, kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, rasio solvabilitas dan pemekaran wilayah). Clark (1997), Carmeli (2008), Adhi Wicaksono (2015), Agus Tubels (2015) dan Sri Husniati dkk (2016) menggunakan indikator keuangan dan indikator non keuangan terhadap kondisi *financial distress* pemerintah daerah, sementara itu (Sutaryo *et al.*, 2010; Atmaja, 2012; Wibowo dan Sumekto, 2013) menggunakan rasio keuangan dalam memprediksi *financial distress* pemerintahan.

Penelitian terkait *financial distress* pada sektor publik masih terbatas dilakukan dan lebih banyak dilakukan di sektor swasta hal tersebut dapat dibuktikan dengan perkembangan penelitian terkait topik *financial distress* lebih dominan pada sektor swasta dibandingkan sektor publik. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena kalau pemerintah mengalami kondisi *financial distress* akan berdampak nyata terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat sehingga terjadi stagnasi dalam taraf kesejahteraan masyarakat, selain hal tersebut juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena tidak didukung oleh pelayanan publik yang memadai.

Penelitian ini mengacu ke penelitian Syurmita (2014), penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, letaknya perbedaannya yaitu adanya tambahan variabel independen yaitu luas wilayah, proksi variabel pemekaran wilayah dengan menggunakan umur administratif pemerintah daerah dengan menggunakan satuan tahun berdasarkan undang-undang pembentukan daerah, dan menggunakan pengamatan tahun yang lebih lama karena pada umumnya penelitian terdahulu hanya menggunakan amatan satu tahun.

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari kemandirian keuangan, derajat

desentralisasi, jumlah penduduk, pemekaran wilayah dan luas wilayah terhadap *financial distress* pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap kondisi *Financial Distress*”.

2. TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Teori ketergantungan Sumber Daya

Teori ketergantungan sumber daya dikemukakan oleh Emerson (1961) menjelaskan tentang hubungan antara konsep kekuasaan dengan konsep ketergantungan dalam suatu organisasi. Ketergantungan merupakan bagian utama dari kekuasaan, dimana organisasi yang memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar terkait tugas dan wewenang organisasi tersebut.

Untuk mengatur hubungan saling ketergantungan organisasi dapat memakai strategi kerjasama dari Prespektif yang dibangun oleh Pfeffer dan Salancik (1978) dalam (Syurmita, 2014), menjelaskan bahwa organisasi menurut mereka bergantung secara eksternal terhadap *resources* dan sumber daya dapat memberikan pengaruh kekuasaan kepada organisasi. Teori ketergantungan sumber daya menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam mengelola dan mengurus daerahnya masing-masing.

Pada sektor publik menggambarkan kekuasaan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dalam mencapai tujuan organisasi untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat.

2.2 Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan berlandaskan pada dasar hukum UU No.12 tahun 1999 dan direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

peraturan perundangan. Albasiah, (2013) dalam (Sartika, 2016).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2002) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan otonomi daerah yaitu perpindahan hak dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya secara mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bisa memaksimalkan pengelolaan daerahnya dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terjadi dalam bentuk:

- a. Pengalokasian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dan Dana Alokasi Umum.
- b. Pemberian pinjaman atau hibah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yaitu dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
- c. Pemberian pinjaman atau penyertaan modal oleh pemerintah pusat kepada perusahaan daerah atau sebaliknya pemberian pinjaman atau penyertaan modal oleh perusahaan daerah kepada pemerintah daerah
- d. Pemberian pinjaman oleh perusahaan Negara kepada pemerintah daerah

2.4 *Financial distress*

Pada sektor publik *financial distress* merupakan suatu kondisi dimana pemerintah tidak bisa memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Jones and Walker, 2007). Kesulitan keuangan ini ditandai dengan sedikitnya alokasi untuk belanja modal dalam membangun infrastruktur

sebagai upaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan memadai kepada masyarakat.

Jadi, *financial distress* dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana pemerintah tidak mengoptimalkan alokasi belanja modal dalam membangun infrastruktur publik sehingga akan berdampak terhadap tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat maka hal tersebut yang menyebabkan pemerintah mengalami kondisi *financial distress*. Clark (1997) menyatakan kesulitan keuangan pada pemerintah sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki terhadap masalah sosial ekonomi, pengeluaran, dan tingkat utang pemerintah daerah, indikator yang digunakan yaitu indikator rasio, karakteristik sosial ekonomi, dan pengukuran arus pendanaan. Kekurangan dana Pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik, pelayanan yang berkualitas, percepatan pembangunan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan tujuan otonomi Daerah (Syurmita, 2014).

2.5 Karakteristik Pemerintah daerah

Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia (2006) karakteristik adalah ciri-ciri khusus, mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Jadi dapat disimpulkan jika dianalogikan ke pemerintah daerah karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu daerah. Karakteristik daerah dijelaskan melalui struktur organisasi yang dijelaskan melalui ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, umur administratif pemda, differensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Sementara untuk lingkungan eksternal menggunakan pembiayaan utang dan *intergovernmental revenue*. Penelitian ini menggunakan model karakteristik pemerintah daerah dari komponen struktur organisasi yang digambarkan dengan umur administratif Pemerintah daerah yang merupakan proksi pemekaran wilayah, tingkat kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, luas wilayah, dan kompleksitas pemerintah daerah diproksikan dengan jumlah penduduk.

2.6 Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan adalah kemampuan atau kontribusi pendapatan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya dalam upaya untuk menjalankan sistem pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerahnya (Rukmana, 2013). Semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah berarti daerah tersebut memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dengan mengalokasikan belanja modal lebih banyak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga probabilitas mengalami *financial distress* akan kecil kemungkinannya dibandingkan dengan daerah yang kemandirian keuangannya rendah.

H1: kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

2.7 Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tingkat kekuatan pemerintah dalam melakukan kebijakan untuk mengurus dan mengatur daerahnya, sehingga pemerintah yang memiliki PAD yang tinggi menunjukkan tingkat derajat desentralisasi yang tinggi dalam mengurus pemerintahannya dengan mengandalkan pendapatan asli daerah lebih banyak disamping dana transfer (perimbangan) dalam melakukan kebijakan desentralisasi, sehingga pemerintah dapat melakukan kebijakan yang lebih banyak dalam mengoptimalkan belanja modal.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah dengan derajat desentralisasi yang tinggi probabilitas untuk mengalami *financial distress* akan kecil kemungkinannya karena memiliki kewenangan yang lebih banyak dalam mengalokasikan PAD nya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dibandingkan dengan daerah yang pendapatan asli daerahnya lebih rendah karena daerah yang PAD nya rendah akan bergantung pada transfer dana pemerintah pusat.

H2: kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi berpengaruh negatif terhadap kondisi *financial distress*

2.8 Kompleksitas Pemerintah Daerah

Kompleksitas pada pemerintah pada riset akuntansi diproksikan dengan jumlah penduduk suatu wilayah tertentu (Ingram, 1984; Robbins dan Austin, 1986; Evans dan Patton, 1987; Cheng, 1992; Christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007). Jumlah penduduk merupakan jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah yang dimiliki oleh pemerintahan yang membutuhkan pelayanan yang dari pemerintah, yang tentunya memiliki banyak tuntutan untuk pelayanan yang lebih memadai.

Selain itu jumlah penduduk juga merupakan pengawas kinerja pemerintah. Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah. jumlah penduduk merupakan sebuah pengukuran kompleksitas suatu daerah, artinya semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula tingkat tuntutan layanan publik yang memadai diharapkan oleh masyarakat setempat.

Penelitian ini juga menduga bahwa semakin banyak populasi penduduk yang dimiliki sebuah kabupaten/kota, maka probabilitas mengalami *financial distress* akan semakin besar karena banyak tuntutan dari masyarakat untuk pelayanan yang lebih baik. Penelitian Syurmita (2014), Jones and Walker (2007) menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap prediksi *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kondisi *financial distress*

2.9 Pemekaran Wilayah

Proksi pemekaran wilayah pada penelitian ini yaitu umur administratif pemerintah daerah. Daerah yang sudah lama berdiri dengan umur pemerintahan yang lebih lama tentu memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dalam mengoptimalkan pemberian pelayanan publik yang memadai kepada masyarakat melalui optimalisasi belanja modal, dibandingkan daerah yang merupakan hasil pemekaran serta baru berdiri tentu belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

Sehingga diduga daerah hasil pemekaran dengan umur yang lebih muda maka

probabilitas untuk mengalami *financial distress* akan lebih besar dibandingkan daerah yang sudah lama berdiri atau bukan pemekaran. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: umur administratif Pemerintahan berpengaruh positif terhadap *financial distress*

2.10 Luas Wilayah

Luas wilayah suatu daerah menggambarkan cakupan besarnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin luas wilayah daerah maka kebutuhan akan infrastruktur di daerah tersebut lebih banyak sehingga diharapkan pengalokasian belanja modal yang lebih besar. Luas wilayah dapat dijadikan ukuran untuk memprediksi probabilitas *financial distress* suatu daerah.

Pemerintah daerah yang wilayahnya lebih luas maka probabilitas untuk mengalami *financial distress* juga akan lebih besar karena pelayanan ataupun pembangunan yang harus dilakukan juga akan lebih besar dibandingkan daerahnya yang wilayahnya lebih kecil. Wicaksono (2015), dalam penelitiannya menemukan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap *financial distress* yang dialami pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: luas wilayah berpengaruh positif terhadap *financial distress*

2.11 Penelitian Terdahulu

Jones and Walker (2007) meneliti tentang *Explanators of Local Government Distress* di Australia. Penelitian ini menggunakan indikator keuangan dan non keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan *council characteristic, infrastructure* dan *financial variable* berpengaruh *local service delivery*.

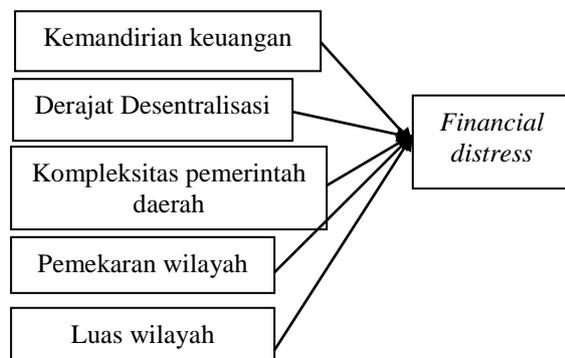
Syurmita (2014) meneliti tentang Pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap prediksi *financial distress*. Penelitian ini menggunakan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, rasio solvabilitas, jumlah penduduk dan pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukkan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, jumlah penduduk dan pemekaran wilayah berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* sedangkan solvabilitas tidak berpengaruh

Sri Husniati dkk (2016) meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress*. Penelitian ini menggunakan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, rasio keuangan, jumlah penduduk dan pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukkan hanya derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap prediksi *financial distress*.

Mutiara Galuh Pratiwi (2014) meneliti tentang Prediksi status *financial distress* pemerintah daerah. penelitian ini menggunakan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, solvabilitas, jumlah penduduk dan pemekaran wilayah dalam memprediksi *financial distress*. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel berpengaruh secara signifikan.

Adhi Wicaksono (2015) meneliti tentang Financial Distress pada Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia Penelitian ini menggunakan variabel kemandirian keuangan, letak geografis opini audit, jumlah penduduk, luas wilayah dan total aset. Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel berpengaruh secara signifikan.

2.12 Kerangka Konseptual



3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk riset asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya (Umar, 2003:30). Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif.

Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik,

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, (Sugiyono, 2012).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu *financial distress* dan variabel independen yaitu karakteristik pemerintah daerah (kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, kompleksitas pemerintah daerah yang diproksikan dengan jumlah penduduk, pemekaran wilayah yang diproksikan dengan umur administratif Pemerintah daerah, dan luas wilayah). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah sebagai variabel independen terhadap *financial distress* sebagai variabel dependen.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia terdiri dari 34 Provinsi. Terdapat 508 kabupaten dan kota. Teknik sampling yang digunakan *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2012).

Teknik penyampelan yang digunakan yaitu penyampelan acak sederhana (*simple random sampling*) dan ukuran pengambilan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin. Terdapat jumlah sampel 224 pemerintah yang terpilih. Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Penyampelan acak dilakukan dengan tujuan agar dapat menetralsisir kondisi seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan *pooled data* yaitu kombinasi antara data *time series* dengan data *cross section* berupa data laporan keuangan dan data dari BPS meliputi jumlah penduduk dan luas wilayah selama periode 2015-2017.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *financial distress* pemerintahan. *Financial distress* yaitu suatu kondisi dimana pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan disebabkan oleh minimnya alokasi belanja modal (Jones and Walker, 2007).

$$\text{Financial distress} = \frac{\text{Belanjamodal}}{\text{TotalBelanja}}$$

Variabel Independen

1. Kemandirian keuangan

Kemandirian keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan Pemerintahan yang mencerminkan sejauhmana pedapatan asli daerah mampu membiayai kebutuhan daerah. Rumusan kemandirian keuangan adalah sebagai berikut (Syurmita, 2014).

$$\text{Kemandirian keuangan} = \frac{\text{PAD}}{\text{TotalBelanja}}$$

2. Derajat desentralisasi

Derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Menurut Halim (2004) Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Rumusan derajat desentralisasi adalah sebagai berikut (Syurmita, 2014).

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{TotalPendapatan}}$$

3. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah. Jumlah penduduk yang dilambangkan dengan *Size* diukur menggunakan rumus Ln dari populasi penduduk (Syurmita, 2014).

$$\text{Size} = \text{Ln Populasi Penduduk}$$

4. Pemekaran wilayah

Pemekaran wilayah pada penelitian ini diprosikan dengan umur administratif pemerintah daerah. Umur administratif

pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan berdasarkan umur pemerintah daerah sejak terbitnya undang-undang pembentukan pemerintah daerah yang bersangkutan dan variabel umur pemerintah daerah ini dinyatakan dalam satuan tahun (Syafitri,2012).

Umur Pemerintah Daerah = umur pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan masing-masing pemerintah daerah.

5. Luas wilayah

Luas wilayah suatu daerah menggambarkan cakupan besarnya pelayanan yang akan diberikan oleh pemerintah daerah. Luas wilayah daerah diukur dengan melihat berapa luas wilayah daerah tersebut. Luas wilayah yang dilambangkan dengan *Size* diukur menggunakan rumus Ln luas wilayah (Adhi Wicaksono, 2015)

$$\text{Luas wilayah} = \text{Ln Luas wilayah}$$

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi logistik biner. Regresi logistik biner digunakan apabila variabel dependennya berupa variabel biner. Dalam penelitian ini variabel biner yang memiliki dua tingkatan berbeda yaitu Pemerintah daerah yang mengalami *financial distress* (1) dan pemerintah daerah yang tidak mengalami *financial distress* (0). kategori tersebut didasarkan pada rasio belanja modalnya, jika kurang dari 30% maka termasuk dalam kategori *financial distress* diberi bobot (1) namun jika tercapai 30% dikategorikan non *financial distress* diberi bobot (0). Peraturan presiden No.5/2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2015 dan peraturan presiden No.2/2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019).

Model persamaan yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln}\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi data

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan memngolah data laporan keuangan dan data dari BPS dari tahun 2015-2017. Populasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Terdapat 508 kabupaten/kota di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini yaitu *probability sampling* yaitu tehnik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2012).

Teknik penyampelan yang digunakan adalah penyampelan acak sederhana (*simple random sampling*) dan ukuran pengambilan sampel dengan menggunakan rumus slovin. Terdapat jumlah sampel 224 pemerintah daerah yang terpilih menjadi objek penelitian.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk mendapatkan gambaran umum data penelitian. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi data yang diteliti dengan melihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan deviasi standar data yang diteliti dengan tujuan agar data lebih jelas dan mudah dipahami.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan analisis data, diperoleh nilai Nagelkerke R^2 sebesar 0,352 atau 35,2% hal tersebut menunjukkan bahwa, kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, jumlah penduduk, pemekaran wilayah dan luas wilayah mampu menjelaskan pengaruh terhadap *financial distress* dalam model yang digunakan yaitu sebesar 34,2% sedangkan sisanya 64,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dan di luar variabel pada penelitian ini.

4.4 Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Distress*

Hasil pengujian hipotesis pertama memiliki nilai signifikansi 0,016 dan koefisien 17,337. Nilai signifikansi kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Nilai koefisien regresinya adalah positif 13,661, ini berarti hipotesis pertama (H1) ditolak karena penelitian ini tidak

berhasil membuktikan bahwa kemandirian keangan berpengaruh negative dan signifikan terhadap *financial distress*. Secara parsial kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Syurmita (2014), Wicaksono (2015), dan Jones and Walker (2007) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress* dan tidak sejalan dengan pandangan teori ketergantungan sumberdaya (Peffer dan Salancik, 1978) bahwa pemerintah daerah yang mampu menguasai sumber daya akan memiliki kekuatan untuk survive dan terhindar dari *financial distress*. Tidak selamanya semakin tinggi PAD maka semakin tinggi total belanja yang akan dialokasikan untuk memberikan pelayanan untuk menghindari kondisi *financial distress* (Agus Tubels, 2015).

4.5 Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap *Financial Distress*

Hasil pengujian hipotesis kedua memiliki nilai signifikansi 0,014 dan koefisien -17,682. Nilai signifikansi kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Nilai koefisien regresinya adalah negatif 17,682, hal ini berarti hipotesis kedua (H2) diterima, artinya secara parsial derajat desentralisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yanti (2018), Syurmita (2014), Wicaksono (2015), Sri Husniati dkk (2016) dan Jones and Walker (2007) yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan cenderung mengalami *financial distress*. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami kondisi *financial distress* juga akan semakin kecil. Tingginya kontribusi PAD terhadap total pendapatan juga menunjukkan adanya peningkatan pada kemampuan dan kebijakan yang bisa dilakukan oleh daerah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

4.6 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap *Financial Distress*

Hasil pengujian hipotesis ketiga memiliki nilai signifikansi 0,000 dan koefisien 0,738. Nilai signifikansi kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Nilai koefisien regresinya adalah positif 0,738, artinya secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Ini berarti hipotesis ketiga (H3) diterima dan konsisten dengan penelitian Syurmita (2014), Jones and Walker (2007), dan Wicaksono (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Pada penelitian ini secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Artinya pemerintah daerah dengan penduduk yang lebih besar memiliki probabilitas yang lebih besar untuk mengalami kondisi *financial distress*.

Berdasarkan Pasal 28 UU No 32 tahun 2004 jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Penduduk yang banyak akan memiliki banyak tuntutan terhadap transparansi serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah karena penduduk dalam kegiatan pemerintahan memiliki peranan penting sebagai pengawas kinerja pemerintah (Ni Luh Made Dwi Indri Mutia Mahayani dan Gayatri, 2017).

Semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah maka semakin banyak pengawas kinerja pemerintah dan akan semakin banyak tuntutan-tuntutan dan kebutuhan penduduk akan fasilitas publik yang memadai untuk mendapatkan pelayanan yang memadai dari pemerintah, sehingga kemungkinan pemerintah daerah dengan jumlah penduduk yang banyak untuk mengalami kondisi *financial distress* akan lebih besar dibanding dengan daerah yang jumlah penduduknya lebih sedikit.

4.7 Pengaruh Pemekaran Wilayah terhadap *Financial Distress*

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) memiliki nilai signifikansi 0,000 dan koefisien 0,031. Nilai signifikansi kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Nilai koefisien regresinya adalah

positif 0,031, ini berarti H4 diterima, artinya pemekaran wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*.

Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah daerah yang merupakan hasil pemekaran dan tentunya memiliki umur yang lebih muda dan probabilitasnya untuk mengalami kondisi *financial distress* lebih besar dibanding daerah yang bukan hasil pemekaran dan memiliki umur yang lebih lama. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syurmita (2014) dan Pratiwi (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemekaran wilayah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*.

Hal ini menunjukkan pemerintah daerah yang bukan merupakan hasil pemekaran mempunyai umur lebih lama dan memiliki kemampuan mengelola pemerintahan yang lebih baik dibanding daerah yang merupakan hasil pemekaran karena umur yang lebih muda dan belum memiliki cukup pengalaman dalam pemerintahan sehingga memiliki kinerja yang lebih buruk sehingga probabilitas mengalami *financial distress* lebih besar. Amitabh (2006) mengatakan bahwa pertumbuhan umur organisasi akan meningkatkan pengalaman organisasi tersebut dalam menjalankan suatu pemerintahan.

4.8 Pengaruh Luas Wilayah terhadap *Financial Distress*

Hasil pengujian hipotesis kelima memiliki nilai signifikansi 0,037 dan koefisien -0,157. Nilai signifikansi kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Nilai koefisien regresinya adalah negatif 0,157. Ini berarti hipotesis kelima (H5) ditolak karena penelitian ini tidak berhasil mendukung hipotesis luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Secara parsial luas wilayah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. Luas wilayah menggambarkan kebutuhan sarana dan prasarana suatu daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) dan Jones and Walker (2007) yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Penelitian ini gagal mendukung hipotesis kelima yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini disebabkan

oleh Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk memberikan pelayanan yang memadai dan sesuai standar untuk masyarakat.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan:

- a. Hasil statistik deskriptif diketahui bahwa dari 224 sampel pemerintah daerah dengan periode pengamatan 3 tahun sehingga totalnya 672. Hanya 231 pemerintah daerah yang tidak mengalami *financial distress* sedangkan sisanya 441 mengalami *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa 65,6% pemerintah daerah mengalami *financial distress* yang artinya pemerintah tidak memiliki kecukupan dana dalam mengoptimalkan alokasi belanja modal sebagai upaya memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat.
- b. Kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. hal ini menunjukkan pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan yang tinggi cenderung akan mengalami *financial distress* karena tidak selalu mengoptimalkan pendapatannya untuk mengoptimalkan belanja modal melainkan lebih banyak untuk belanja rutin yang sifatnya kurang produktif.
- c. Derajat desentralisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. hal ini menunjukkan pemerintah daerah yang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi cenderung tidak akan mengalami kondisi *financial distress* dikarenakan pemerintah daerah memiliki banyak kewenangan dan kebijakan untuk mengoptimalkan belanja modal dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dan sesuai standar kepada masyarakat.
- d. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan jumlah penduduk yang banyak akan cenderung mengalami kondisi *financial distress* karena banyak nya pelayanan yang harus disediakan untuk penduduk disertai

dengan banyaknya tuntutan pelayanan dari penduduk di suatu daerah tersebut untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik. Pemekaran wilayah yang diprosikan dengan umur administratif penda berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan daerah pemekaran dengan umur yang lebih muda cenderung akan mengalami kondisi *financial distress* hal tersebut disebabkan oleh pemerintah tersebut belum mempunyai pengalaman yang begitu banyak dalam menjalankan pemerintahan dan belum memiliki kemampuan mengelola yang begitu baik dibandingkan daerah yang bukan pemekaran.

- e. Luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. hal ini menunjukkan pemerintah daerah dengan wilayah yang lebih luas cenderung tidak akan mengalami kondisi *financial distress*. hal ini disebabkan belanja modal dialokasikan berdasarkan kebutuhan sarana dan prasarana daerah tersebut.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk melakukan upaya pengoptimalan belanja modal bagi pemerintah kabupaten dan daerah di Indonesia dalam memberikan pelayanan yang memadai dan sesuai standar untuk masyarakat dalam upaya menghindari kondisi *financial distress* pada sektor publik dan pencapaian tujuan organisasi.

5.3 Keterbatasan penelitian

Penelitian ini dirancang dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu

1. Penelitian ini hanya mengamati tiga tahun kondisi pemerintahan daerah sehingga peneliti selanjutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi
2. Nilai Nagelkerke R^2 adalah 0,352 atau 35,2% yang berarti kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen hanya 35,2%. Sehingga masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi *financial distress* pemerintah daerah.

5.4 Saran

Untuk pemerintah daerah, melakukan upaya untuk lebih mengoptimalkan belanja modal dalam mendorong pembangunan infrastruktur untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar dan lebih baik kepada masyarakat sehingga terhindar dari kondisi *financial distress*

Untuk peneliti selanjutnya Menggunakan indikator atau variabel lain yang diduga sebagaifaktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* pemerintah daerah karena nilai Nagelkerke R² yang dihasilkan baru 35,2%.

DAFTAR PUSTAKA

- Amitabh, Joshi (2006). *Disclosure in Corporate Reporting of Public Sector Financial Institutions* (PSFs). www.ssrn.com.
- Carmeli, A. Cohen, A. (2001) *The Financial Crisis of the Local Authorities in Israel: A Resource-Based Analysis*. In: Public Administration, 79(4), 893– 913.
- Christiaens, Johan and Vincent V. Pateghem (2007). *Governmental Accounting Reform: Evolution of The Implementation in Flemish Municipalities*. Financial Accountability & Management, 23(4), 0267-4424.
- Evans, J & Patton, J (1987). *Signalling and Monitoring in Public Sector Accounting*. Journal Accounting Research, 25 (supplement), 130-158.
- Jones, Steward and R., G Walker (2007). *Explanators of Local Government Distress*. ABACUS 43 (3): 396-418.
- Kleine, et al (2005). *Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress*.
- Ni Luh Made Dwi Indri Mutia Mahayani dan Gayatri. 2017. Jumlah penduduk sebagai pemoderasi pengaruh kemandirian keuangan dan level of capital outlay terhadap financial distress. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Pratiwi, Mutiara Galuh. 2014. *Prediksi status financial distress pemerintah daerah*. e-journal Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rukmana, wan Vidi. 2013. "pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Kepulauan Riau". Jurnal akuntansi. Universitas Maritim Raja Ai haji.
- Sri Husniati dkk. 2016. *Faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress*. Jurnal dan prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi.
- Sudarsana, Hafidh Susila. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan temuan Audit BPK terhadap kinerja Pemda*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Solikin, Ikin. 2010. *Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat*.
- Syurmita. 2014. *Pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap prediksi financial distress*. SNA. XVII. Mataram.
- Tubels, Agus. 2015. *Evaluasi financial distress pada Pemerintah Kota Bandar Lampung*. Jurnal Akuntansi
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Wibowo dan Samekto (2013). *The Relevance Of Accounting Information And Financial Distress Of Local Government In East Java*. The Indonesian Accounting Review Volume 3, No. 1, January 2013, pages 43 – 52.
- Wicaksono, adhi. 2015. *Financial Distress pada Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia*. e-journal digilib UNS. Tesis.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Iteration History ^{a,b,c}			
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	864,924	,625
	2	864,853	,647
	3	864,853	,647
a. Constant is included in the model.			
b. Initial -2 Log Likelihood: 864,853			
c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.			

Lampiran 2

Iteration History ^{a,b,c,d}								
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients					
			Constant	X1	X2	X3	X4	X5
Step 1	1	685,494	-5,452	7,861	-8,498	,487	,024	-,123
	2	667,875	-7,797	13,729	-14,221	,686	,030	-,151
	3	666,982	-8,398	16,821	-17,182	,735	,031	-,157
	4	666,975	-8,431	17,328	-17,673	,738	,031	-,157
	5	666,975	-8,431	17,337	-17,682	,738	,031	-,157
	6	666,975	-8,431	17,337	-17,682	,738	,031	-,157
a. Method: Enter								
b. Constant is included in the model.								
c. Initial -2 Log Likelihood: 864,853								

Lampiran 3

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	666,975 ^a	,255	,352
a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.			

Lampiran 4

Hosmer and Lemeshow Test		
Chi-square	df	Sig.
6,917	8	,546

Lampiran 5

Variables in the Equation									
		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	X1	17,337	7,217	5,772	1	,016	33844132,270	24,364	47013650326 718,730
	X2	-17,682	7,219	5,999	1	,014	,000	,000	,029
	X3	,738	,148	24,932	1	,000	2,092	1,566	2,795
	X4	,031	,005	46,960	1	,000	1,031	1,022	1,041
	X5	-,157	,071	4,959	1	,026	,855	,744	,981
	Constant	-8,431	1,635	26,577	1	,000	,000		
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5.									